

BAB II

ARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA DALAM MENENTUKAN KEIKUTSERTAAN DI SEBUAH KERJASAMA MULTILATERAL

Didalam bab ini penulis akan membahas bagaimana arah kebijakan luar negeri China dalam menentukan keikutsertaannya di sebuah kerjasama multilateral. Kemudian bab ini juga akan membahas mengenai pandangan China terhadap kerangka kerjasama TPP.

Bab ini akan dibagi kedalam dua subbab utama. Dimana masing subbab juga akan dipecah menjadi beberapa pembahasan. Pada subbab pertama bab ini, penulis akan memberikan penjelasan terkait kebijakan luar negeri China. Penjelasan dalam subbab tersebut akan berisi penjabaran strategi kebijakan luar negeri China, hubungan China dengan Asia-Pasifik serta penyajian data terkait *free trade agreement* yang telah diikuti oleh China. Selanjutnya pada subbab kedua penulis akan memberikan penjelasan terkait apa itu Trans-Pacific Partnership serta bagaimana China memandang kerangka kerjasama tersebut.

A. Kebijakan Luar Negeri China

Keputusan suatu negara untuk ikut berpartisipasi kedalam suatu kerangka kerja sama dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari pengaruh arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Umumnya sebuah kebijakan luar negeri dibuat agar dapat memenuhi kepentingan nasional suatu negara dalam isu-isu tertentu.

Untuk memastikan kepentingan nasional yang ingin dicapai dapat diperoleh oleh suatu negara, sebuah kebijakan luar negeri harus dikeluarkan dengan penuh

pertimbangan. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut akan disusun menjadi sebuah strategi khusus untuk dijadikan sebagai sebuah strategi suatu negara dalam menjalankan kebijakan luar negerinya.

1. Strategi Kebijakan Luar Negeri China

Di awal 1990-an Cina menerapkan suatu strategi pasca Perang Dingin yang baru, bercirikan kebijakan “*good neighbourhood*” (bertetangga yang baik), yang bertujuan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai model strategi bagi “kebangkitan Cina yang damai” (*peaceful rise*). Pada saat yang sama, ASEAN juga menjalankan suatu kampanye diplomatik untuk melibatkan diri, daripada mengisolasi, dengan Cina. Oleh karena itu, ada suatu proses timbal balik di antara strategi “*constructive engagement*” ASEAN dan pengadopsian diplomasi “*soft power*” oleh Cina untuk menepis persepsi tentang Cina sebagai ancaman. Pemulihan hubungan baik di antara Cina dan ASEAN ini akan menjadi proses perubahan-identitas dalam jangka waktu panjang bagi kedua belah pihak, yang telah menafsirkan ulang kepentingan-kepentingan mereka dan mengubah cara mereka bersikap terhadap satu sama lain. Pemulihan hubungan baik ini merupakan hal yang mendasar dalam memahami mengapa Cina dan ASEAN telah berupaya untuk memelihara hubungan mereka dalam cara yang konstruktif dan damai dan mengapa hubungan di antara Cina dan ASEAN tersebut telah berkembang menuju arah yang positif (Weissmann, 2014).

Catatan terbaru mengenai kebijakan luar negeri China menunjukkan menunjukkan adanya pembaharuan, keterlibatan dan integrasi terhadap tatanan dunia saat ini, hal ini sangat jauh berbeda dengan arah kebijakan luar negeri China dimasa lalu. penelitian terhadap kebijakan luar negeri kontemporer China

menunjukkan peningkatan interaksi China dengan dunia luar melalui kerja sama ekonomi di era globalisasi dan memperluas keterlibatan China dengan organisasi internasional yang berurusan dengan keamanan, ekonomi, politik, kebudayaan dan masalah-masalah lainnya. Hal ini mendemonstrasikan adanya tren yang berkelanjutan terhadap peningkatan transparansi pengambilan keputusan serta susunan kebijakan dalam kebijakan luar negeri China (Sutter, 2010).

Terdapat beberapa poin penting yang menjadi pendekatan China dalam menyusun kebijakan luar negerinya. Poin-poin tersebut ialah adanya dorongan yang kuat untuk mempertahankan lingkungan dunia yang aman dan damai. Hal ini sangat berguna bagi China untuk menjalankan program pembangunannya dan membantu mempromosikan stabilitas dan keamanan dunia. China berusaha untuk mempercepat proses pembangunannya dengan menjalin sejumlah kerja sama ekonomi yang bertujuan untuk menyatukan China dengan tatanan globalisasi ekonomi dunia. Hal-hal tersebut di atas sangat berbeda dengan langkah-langkah kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh China di masa lalu.

Lebih lanjut poin-poin penting dalam strategi kebijakan luar negeri China pada saat ini dapat di-*highlight* sebagai berikut: (1) kemampuan diplomasi yang kuat diikuti dengan usaha keras China untuk mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat dan kekuatan dunia lainnya untuk menekankan citra China sebagai negara yang kuat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. (2) diplomasi yang aktif dan positif serta interaksi lainnya yang dilakukan China dengan negara-negara tetangga sebagai bentuk perlindungan dari pasang surut hubungan China dengan Amerika Serikat telah menyebabkan Amerika Serikat memberikan tekanan negatif terhadap pemerintahan China. (3) interaksi China dengan organisasi

internasional serta regional yang kian meningkat di bidang ekonomi, keamanan serta bidang-bidang lainnya dimana hal tersebut pada masa lalu dipandang dengan penuh kecurigaan oleh china kini telah dipandang sebagai hal yang memberikan keuntungan. (4) kerelaan China untuk mengemban berbagai macam tanggung jawab internasional dimana pada masa lalu hal ini dianggap sebagai hal yang akan memperlambat proses pembangunan China (Sutter, 2010).

Dalam praktek nya, strategi China meliputi beberapa inisiatif penting:

- Membentuk kerja sama yang komprehensif dengan semua negara disekitar China dan pemerintah manapun di dunia.
- Membentuk serta mendemonstrasikan *self-restraint* China dalam upaya untuk menciptakan citra kemajuan China sebagai peluang bagi dunia dan bukan merupakan ancaman
- Kerelaan untuk mengesampingkan keluhan yang berulang mengenai hegemoni Amerika Serikat dalam ranah politik dunia selama hal itu tidak mengganggu inti dari kepentingan China terkait Taiwan, Partai Komunis di China serta berbagi isu lainnya.
- Pembangunan ekonomi China yang membuka peluang bagi China untuk dapat memperluas pengaruhnya dalam ekonomi dunia agar China dapat muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia, keuntungan dari peningkatan tersebut menyebar keseluruh dunia dan posisi baru China tersebut tidak dianggap sebagai sebuah ancaman bagi duni maupun negara-negara mitra kerja sama ekonomi China.
- Peningkatan keterlibatan China dalam organisasi regional dan multilateral lainnya. Upaya ini dirancang untuk meningkatkan profil

China dimata dunia sekaligus menyalurkan pengaruh China terhadap institusi-institusi tersebut, yang kemudian akan mengurangi kecurigaan dunia terhadap China, terutama Amerika Serikat.

2. Hubungan China dengan Asia-Pasifik

Secara tradisi, China melihat melihat negara tetangganya di kawasan Asia Timur sebagai negara paling penting dalam domain kebijakan luar negerinya. Negara-negara tersebut telah memiliki hubungan yang lama dengan China sejak jaman Dinasti Qing. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan China. Kebudayaan Jepang secara umum dipengaruhi oleh Dinasti Tang di China. Sementara Korea sangat dipengaruhi oleh agama serta kesenian yang berkembang di China. Hal serupa juga terjadi di Asia Tenggara, khususnya Vietnam. Selain ikatan kebudayaan, juga terdapat persebaran manusia. Warga keturunan China banyak tersebar di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Singapura (Bader, 2005).

Pada era pasca Perang Dingin, Cina melakukan langkah-langkah diplomatik yang selama ini belum pernah dilakukan guna memperluas jaringan organisasi dan kerja sama bilateral dan multilateral, seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya ekonomi China terhadap perdagangan di kawasan Asia, telah membawa perubahan besar terhadap hubungan China dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Pada era 1990-an, perdagangan antara China dengan negara-negara Asia Tenggara tumbuh sebanyak dua kali lipat. Kemudian pada 1997, ASEAN dan China memutuskan untuk menyusun sebuah payung organisasi yaitu, *the ASEAN-China Joint Cooperation Committee* untuk mengawasi kerja sama politik, ekonomi,

keamanan, dan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terjalin antara ASEAN- China. Masalah-masalah pokok yang menjadi pusat perhatian dalam hubungan China dan Asia Tenggara adalah seputar persaingan ekonomi untuk pasar dan investasi asing, penyelesaian masalah di kawasan Laut China Selatan, dan perhatian terhadap keamanan regional, terutama penerapan modernisasi kekuatan militer China. Banyak pemerintah di ASEAN yang bekerja sama dengan China dalam mempromosikan *Asian Values*. Pola keterlibatan China di kawasan Asia Tenggara konsisten pada tujuan-tujuan yang luas yaitu untuk mengamankan kawasan sekitar China, memperluas keuntungan ekonomi, politik dan militer.

Selain membangun hubungan baik dengan ASEAN, pemerintah China juga berkeinginan kuat untuk meningkatkan hubungannya dengan kawasan yang lebih jauh ketimbang Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pengaruh politik China telah tumbuh hingga ke area dimana pengaruh Amerika Serikat masih sangat kuat yaitu, Australia, Selandia Baru serta negara-negara pasifik lainnya. Hubungan China dan Australia telah menjadi semakin erat dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut berdasarkan catatan yang menunjukkan adanya peningkatan bahan material mentah yang diekspor Australia ke China serta peningkatan barang ekspor China ke Australia.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, persepsi dari pelaku bisnis serta opini publik Australia secara keseluruhan terhadap China cenderung positif. Peningkatan peran China sebagai mitra importir bahan mentah yang penting bagi Australia telah memberikan dampak positif bagi China di sektor bisnis dan pemerintahan. Citra China di mata masyarakat Australia juga ikut membaik seiring dengan menurunnya

citra Amerika Serikat yang diakibatkan oleh serangkaian serangan yang dilakukan ke Irak dan wilayah lainnya dibawah pemerintahan Bush.

Sementara itu, di Selandia Baru hubungan yang dibangun dengan China tidak setinggi yang dilakukan oleh Australia. Hal ini diakibatkan oleh adanya ketergantungan terhadap Amerika Serikat yang masih sangat tinggi terkait tatanan regional yang dapat memastikan bahwa China akan menyusun kebijakan luar negeri yang selaras dengan kepentingan Selandia Baru untuk memastikan stabilitas kawasan. Berurusan secara efektif dengan China semakin menambah alasan bagi Selandia Baru untuk meingkatkan hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat.

Gambaran umum kebijakan China terhadap negara-negara di kepulauan Pasifik sudah terlihat semakin jelas pada era 1990-an. Upaya diplomatik yang besar dan beberapa bantuan asing yang dilakukan China jauh melebihi kepentingan komersial China yang lainnya. Menurut beberapa ahli hal ini menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari China untuk membangun suatu kemitraan yang erat antara China dengan negara-negara di kawasan “*island chain*” terkait isu keamanan China. Kepentingan China terhadap negara-negara kecil di kawasan pasifik yang semakin jelas ini merupakan sebuah upaya untuk memastikan dukungan terhadap China di *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan institusi internasional lainnya yang terkait dengan isu penting bagi China.

3. Daftar Free Trade Agreement yang dijalin China

Setelah 15 tahun menjadi kandidat, China akhirnya bergabung dengan WTO pada Desember 2001. Bergabungnya China merupakan titik balik yang besar dalam liberalisasi ekonominya. Dengan bergabung ke dalam WTO, China telah berubah dari negara dengan ekonomi yang dulunya tertutup menjadi sebuah negara yang

lebih terintegrasi dengan masyarakat global. Sejak diterima bergabung di WTO China telah secara aktif terlibat dalam kerja sama perdagangan bilateral dan regional. (Salidjanova, 2015)

Menurut Kementerian Perdagangan China (MOFCOM), China telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan 12 mitra yang berbeda. Mengingat ASEAN memiliki 10 anggota dan MOFCOM untuk alasan politis tidak mengkategorikan *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) dengan Taiwan sebagai sebuah FTA, maka China saat ini telah memiliki 22 mitra dagang. Dengan tambahan *Regional Economic Comprehensive Partnership* (RCEP), Beijing juga sedang mempertimbangkan enam kerjasama yang terdiri dari tambahan 11 anggota. Hal tersebut membuat China terhitung telah memiliki 33 mitra dagang. Ditambah lagi apabila negosiasi kerjasama *Free Trade Agreement of Asia Pacific* (FTAAP) telah dimulai maka daftar FTA yang telah dijalin oleh China akan bertambah semakin banyak lagi.

Berikut adalah daftar FTA China baik yang telah ditandatangani, sedang dalam proses negosiasi serta sedang dalam pertimbangan:

Tabel 3. 1 Daftar Free Trade Agreement China

Partner	First Signed	Participants	Geography	Phasing of Agreement	WTO reporting
<i>Signed</i>					
<i>ASEAN</i>	<i>2002</i>	<i>Multi-Partner</i>	<i>Proximate</i>	<i>Step-by-step: Framework (2002), goods (2004), services (2007), investment (2009)</i>	<i>Enabling Clause & GATS Art. V</i>
<i>Hong Kong</i>	<i>2003</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Proximate</i>	<i>Single Undertaking</i>	<i>GATT Art. XXIV & GATS Art. V</i>

<i>Macau</i>	<i>2003</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Proximate</i>	<i>Single Undertaking</i>	<i>GATT Art. XXIV & GATS Art. V</i>
<i>Chile</i>	<i>2005</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Distant</i>	<i>Step-by-step: Goods (2005), Services (2008)</i>	<i>GATT Art. XXIV & GATS Art. V</i>
<i>Pakistan</i>	<i>2006</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Proximate</i>	<i>Step-by-step: Goods (2006), Services (2009)</i>	<i>GATT Art. XXIV & GATS Art. V</i>
<i>New Zealand</i>	<i>2008</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Distant</i>	<i>Single Undertaking</i>	<i>GATT Art. XXIV & GATS Art. V</i>
<i>Singapore</i>	<i>2008</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Proximate</i>	<i>Single Undertaking</i>	<i>GATT Art. XXIV & GATS Art. V</i>
<i>Peru</i>	<i>2009</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Distant</i>	<i>Single Undertaking</i>	<i>GATT Art. XXIV & GATS Art. V</i>
<i>Costa Rica</i>	<i>2010</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Distant</i>	<i>Single Undertaking</i>	<i>GATT Art. XXIV & GATS Art. V</i>
<i>Taiwan</i>	<i>2010</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Proximate</i>	<i>Step-by-step: Framework (2010), goods and services (not signed yet)</i>	<i>GATT Art. XXIV & GATS Art. V</i>
<i>Switzerland</i>	<i>2013</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Distant</i>	<i>Single Undertaking</i>	<i>GATT Art. XXIV & GATS Art. V</i>
<i>Iceland</i>	<i>2013</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Distant</i>	<i>Single Undertaking</i>	<i>Unnotified</i>
<i>Australia</i>	<i>2014</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Distant</i>	<i>-</i>	<i>Early Notification</i>
<i>Under Negotiation</i>					
<i>Norway</i>	<i>-</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Distant</i>	<i>-</i>	<i>Early Notification</i>
<i>Gulf Cooperation Council</i>	<i>-</i>	<i>Multi-Partner</i>	<i>Distant</i>	<i>-</i>	<i>Unnotified</i>
<i>South Korea</i>	<i>-</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Proximate</i>	<i>-</i>	<i>Unnotified</i>
<i>Japan and Korea</i>	<i>-</i>	<i>Multi-Partner</i>	<i>Proximate</i>	<i>-</i>	<i>Unnotified</i>

Meskipun Beijing baru menandatangani berbagai macam FTA pada tahun 2002, namun pada saat ini jumlah FTA yang telah dijalin oleh pemerintah China sudah mulai menyamai pihak Washington. China saat ini memiliki 22 mitra dagang yang tergabung di 12 kerja sama, sedangkan Amerika Serikat memiliki 20 mitra dagang di 14 kerja sama.

Tabel 3. 2 Jumlah Free Trade Agreement China

	United States		China	
	Agreements	Number	Agreements	Number
1980s	Israel ('85)	1		0
1990s	Nafta ('94)	1		0
2000-2005	Jordan ('04), Australia ('04), Chile ('04), Singapore ('04), CAFTA ('05)	5	ASEAN ('02), Hong Kong and Macau ('03), Pakistan ('05), Chile ('05)	4
2006-2015	Bahrain ('06), Morocco ('06), Oman ('06), Peru ('07)	4	Costa Rica ('07), New Zealand ('08), Singapore ('08), Peru ('09)	4
20011-2015	Panama ('11), Colombia ('11), South Korea ('11)	3	Taiwan ('10), Switzerland ('13), Iceland ('13), Australia ('14)	4
Total		14		12

B. Trans-Pacific Partnership

Trans-Pacific Partnership merupakan sebuah perjanjian dagang yang diprakarsai oleh dua belas negara yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Jepang, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Singapura, Peru dan Vietnam. Perjanjian tersebut nantinya akan mencakup \$30 triliun Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan 40% PDB dunia. Jumlah yang sangat besar tersebut telah menyebabkan TPP menjadi pusat perhatian dunia. Apabila nantinya TPP telah diratifikasi maka kerjasama TPP ini akan menjadi kerjasama ekonomi terbesar yang pernah ada di dunia. Diperkirakan TPP akan

meningkatkan PDB ekonomi dunia sebesar US\$ 223 miliar atau setara 0,2% pada tahun 2025 (Rajamoorthy, 2013).

1. Proses Pembentukan Kerja Sama TPP

Pada 1 Januari 2002, negosiasi *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership* digulirkan untuk pertama kali bersamaan dengan pertemuan APEC dengan melibatkan Selandia Baru, Chili dan Singapura. Setelah itu Brunei Darussalam memutuskan untuk bergabung dengan negara-negara anggota “*Pacific 3*” kedalam proses negosiasi sehingga membentuk “*Pacific 4*” pada tanggal 1 Januari 2004. Setahun berikutnya pada tanggal 1 Januari 2005 TPSEP mulai berlaku. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2006 TPSEP mengumumkan adanya pengurangan pajak sebanyak 90% diantara negara-negara anggota, dan pengurangan pajak disemua sektor perdagangan secara total atau 0 pada tahun 2015. Ditahun 2008, tepatnya pada tanggal 1 Maret Amerika Serikat akhirnya setuju untuk bergabung kedalam perundingan tentang liberalisasi jasa keuangan dengan negara-negara anggota TPSEP. Australia, Peru, dan Vietnam menyusul bergabung pada tanggal 1 November 2008. Pada tanggal 1 Januari 2010, Korea Selatan diundang untuk bergabung namun undangan tersebut ditolak. Kemudian Malaysia memutuskan untuk bergabung pada tanggal 1 Oktober 2010. Pada tanggal 1 Oktober 2012 Kanada dan Meksiko juga bergabung kedalam negosiasi TPP disusul Jepang yang secara resmi bergabung kedalam proses negosiasi pembentukan *Trans-Pacific Partnership* pada tanggal 23 Juli 2013. Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2015 kerja sama *Trans-Pacific Partnership* diumumkan secara resmi. Namun, pada tanggal 23 Januari 2017 Amerika Serikat dibawah Presiden Donald Trump sebagai

sponsor utama kerja sama ini menyatakan mundur dari TPP (Global Edge, TPP: History, 2017). Dibawah ini adalah *timeline* proses pembentukan kerjasama TPP:

2. Sektor Kerjasama TPP

Dalam negosiasi TPP terdapat sejumlah sektor kerjasama yang masuk kedalam pembahasan. Isu-isu tersebut dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu, akses pasar, perturan dan regulasi, serta pembahasan mengenai isu-isu kontemporer.

Isu utama yang dibahas pada proses negosiasi tersebut adalah pada sektor akses pasar. Kerjasama pada sektor ini akan meliputi pengurangan tarif serta pengurangan hambatan terhadap akses barang dan jasa. Barang dan jasa yang termasuk kedalam ruang lingkup kerjasama ini adalah hasil tekstil, pakaian serta alas kaki. Pada sektor kerjasama ini akses perdagangan jasa juga dipermudah. Kemudian, barang-barang khusus seperti inventaris pemerintah khususnya di bidang militer juga dipermudah aksesnya lewat kerjasama yang dijalin pada sektor ini. Selain itu, akses pasar terhadap hasil pertanian juga masuk dalam pembahasan pada proses negosiasi TPP. Nantinya perdagangan hasil pertanian akan semakin dipermudah dengan adanya pengurangan tarif dan hambatan terhadap akses pasar. Mekanisme penyelesaian masalah-masalah pertanian juga telah disiapkan.

Didalam proses perundingan kerjasama TPP kerjasama dalam akses pasar bukanlah satu-satunya hal yang dibahas. Isu yang juga menjadi perhatian utama dalam proses perundingan ini adalah adanya penyusunan peraturan terkait beberapa hal yang akan menjadi sektor kerja sama. Rencananya, setelah proses negosiasi kerjasama ini dirampungkan, maka akan ada seperangkat peraturan yang mengatur beberapa sektor yaitu, transparansi serta pengaturan biaya teknologi kesehatan dan

farmasi, peraturan terkait investasi asing, kebijakan yang mengatur persaingan diantara negara-negara anggota, peraturan perdagangan obat-obatan, peraturan ketenagakerjaan, peraturan terkait lingkungan, peraturan yang akan mengatur *e-commerce* serta arus aliran data, dan peraturan yang terkait kepabeaan serta fasilitasi perdagangan.

Selain hal-hal tersebut diatas, isu-isu kontemporer juga tidak luput dari pembahasan pada proses negosiasi kerjasama TPP. Isu-isu tersebut merupakan koherensi peraturan, kebijakan terkait perusahaan milik negara, peningkatan daya saing global, dan pembahasan mengenai perusahaan kecil dan menengah.

3. TPP Dalam Regionalisme dan Perdagangan Internasional

Alat utama yang digunakan oleh Washington untuk mengukur inisiatif negara-negara Asia adalah dengan cara memanfaatkan kemampuan mereka untuk menjadi kekuatan yang dominan dikawasan tersebut. Dorongan dari kebijakan luar negeri AS, sebagaimana disebutkan oleh mantan Sekretaris Negara AS, James Baker, selalu mampu untuk menghindari setiap perangkat institusional yang dapat memberi garis pembatas diantara negara-negara Pasifik dan dapat memisahkan Asia Timur dan Amerika Utara. Dalam kaitan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, ada dua pilar utama terkait kemajuan diplomasi dan ekonomi. *Trans- Atlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP) memungkinkan AS untuk mengintegrasikan Uni Eropa baik secara politik maupun ekonomi, dan kerangka kerjasama TPP memberikan akses yang lebih jauh bagi AS untuk menyatukan nilai-nilai serta kebudayaan mereka dengan negara-negara Asia Pasifik. Setelah lebih dari sepuluh tahun tidak memberikan fokus yang banyak terhadap APEC, dan dengan Doha

Round yang tidak memiliki banyak kemajuan, pemerintah AS kini mendorong kerjasama TPP untuk segera diberlakukan.

Tujuan utama dibentuknya kerjasama TPP ini ialah untuk menciptakan peluang baru terhadap perdagangan dan kerjasama dikawasan Asia Pasifik. Hal ini kemudian tidak dapat dipungkiri memicu gesekan konflik dengan China yang juga memiliki kepentingan yang sama di kawasan tersebut. Selanjutnya gagasan dibentuknya TPP ini seringkali diartikan sebagai upaya AS untuk melawakan dominasi China di kawasan Asia Timur. Dalam urusan pembentukan kerjasama area perdagangan bebas (*Free Trade Area*) pemerintah AS tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan negara-negara Asia Timur untuk membentuk kerjasama diantara mereka sendiri, oleh karena itu pembentukan kelompok kerjasama perdagangan yang melibatkan AS dapat bertindak sebagai sebuah alat bagi AS untuk memperkuat pengaruh AS untuk melawan peningkatan dominasi China di kawasan Asia Pasifik. Meskipun dalam proses nya terdapat banyak protes terhadap TPP, akan tetapi TPP terbukti dapat menjadi sebuah *pressure point* yang efisien bagi China (Kim, 2016).